

## Wapres Ma'ruf Amin Dukung KPK, Koruptor 'Di-Nusakambangan-kan'

**TERNATE (IM)** – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak menempatkan narapidana kasus korupsi untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang terletak di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

Diharapkan dengan ditempatkan nabi korupsi di Nusakambangan, KPK bisa memberikan efek jera.

"Usul dari KPK itu kan intinya itu untuk membuat para koruptor itu jera, itu kan, sehingga ada usul di Nusakambangan-kan karena adanya faktor-faktor lain," kata Wapres usai menghadiri acara di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5).

Perlu diketahui bahwa KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola Lapas di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian KPK, koruptor perlu ditempatkan di lapas khusus seperti Nusakambangan agar memberikan efek jera. Sebab, Nusakambangan merupakan lapas yang paling ditakuti.

"Saya kira bisa dibicara-

kan, artinya apa memang untuk membuat jera itu satu-satunya cara dengan men-usakambangan-kan? Atau mungkin dari sistem hukumnya sendiri, pelaksanaan hukumannya," kata Wapres.

Lapas Nusakambangan sendiri berada di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nusakambangan memang terkenal sebagai pulau tempat penjara yang paling mengerikan di Indonesia.

"Hukumannya sudah betul, misalnya, pelaksanaannya kurang betul seperti tadi Anda bilang ada tempat penahannya tidak seperti mestinya penahanan misalnya. Nah mungkin bisa di aspek itu yang menjadi masalah," ungkap Wapres.

"Jadi saya pikir bisa dibicarakan, kalau memang alternatifnya hanya di-nusakambangan-kan untuk membuat jera, ya tentu, tapi kalau ada alternatif lain tentu dibicarakan. Saya kira itu, sebaiknya lebih obyektif apa yang ingin kita capai, intinya membuat jera, kuncinya itu," tandasnya. ● **han**

## KSAD: Rakyat Papua Sangat Idamkan Kedamaian, Lindungi

**JAKARTA (IM)** - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan operasi pasukan TNI di Papua untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana. Terutama dari gangguan dan intimidasi kelompok-kelompok tertentu.

Hal ini ditegaskan Jenderal Dudung saat meninjau Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Dalam arahnya, KSAD meminta seluruh prajurit waspada, tapi tetap bertindak tegas dan terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat melaksanakan tugas operasi di Papua.

"Lindungi rakyat Papua, karena rakyat Papua betul-betul sangat mengidamkan kedamaian. Sehingga, bagi kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu rakyat Papua, tindak tegas," kata Dudung, Kamis (11/5).

Dudung melanjutkan, satuan tugas operasi TNI

di Papua juga perlu menyiapkan sarana untuk membantu rakyat Papua melalui kegiatan teritorial.

Dudung meminta seluruh prajurit menjalankan tugas dengan hati dan pikiran yang jernih. Hal ini agar kelompok yang berseberangan dengan NKRI dapat terketuk hatinya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Terakhir, Dudung menegaskan, dalam penugasan di Papua, prajurit membawa nama bangsa Indonesia, khususnya TNI AD di pundaknya. Sehingga pelaksanaan tugas harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Bertindaklah tegas kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertarikan dan mengancam masyarakat Papua. Bantulah masyarakat yang selama ini merasa terintimidasi, agar dapat hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera," katanya.

"Niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwa penugasan ini adalah untuk membantu kesulitan masyarakat Papua, serta menyajjahterakan mereka," tuturnya. ● **mei**

## Aktivistis Pemuda Bandung Barat Laporkan Hengky Kurniawan ke KPK

**JAKARTA (IM)** - Ketua Aktivistis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz, melaporkan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan ke KPK. Hengky diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam rotasi jabatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

"Kami warga Bandung Barat mendorong upaya penyidikan dan penyelidikan yang akan dilakukan KPK atas laporan kami terkait terjadinya korupsi rotasi, mutasi, dan promosi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan dan kroninya," kata Bilal kepada wartawan, Jumat (12/5).

Bilal menuding rotasi itu tidak sesuai aturan. Bilal menuding Hengky melakukan rotasi jabatan dengan langsung memberikan promosi tak berjenjang.

"Terus juga dari eselon 4A ke eselon 3B, seperti dari kasi atau subag ke ja-

batan sekretaris kecamatan (seccam) dan kepala bidang (kabid). Padahal tidak boleh dari eselon 4A langsung ke eselon 3A," katanya.

"Atau kalau ASN berkinerja baik, maka PPK melakukan promosi ke jabatan lain yang kedudukannya lebih tinggi secara berjenjang dan tidak boleh loncat melewati satu jenjang," ujarnya.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mempelajari laporan itu. Dia menyebut tiap laporan dari masyarakat akan ditelaah oleh tim KPK.

"Kami akan cek lebih dahulu. Namun, prinsipnya, bila ada laporan masyarakat dimaksud, kami pasti tindak lanjut dengan lebih dahulu diverifikasi dan telaah oleh tim pengaduan untuk memastikan persyaratan laporan sebagaimana ketentuan. Termasuk apakah ada kewenangan KPK terkait materi laporan tersebut," tutur Ali. ● **mei**

# Polhukam

FOTO: ANTARA



## PAN DAFTARKAN BACALEG KE KPU

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan pidatonya usai mengajukan berkas bakal calon anggota DPR di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/5). PAN mendaftarkan 580 bakal calon legislatif (caleg) anggota DPR ke KPU.

# STNK Diminta Agar Berlaku Seumur Hidup, Penggugat: Era Digital Masih ke Samsat

STNK dan TNKB harus dimintakan pengesahan setiap tahun. UU LLAJ digugat ke MK agar masa berlaku STNK dan TNKB berlaku seumur hidup kenda-

**JAKARTA (IM)** - Advokat Arifin Purwanto mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Warga Madiun, Jawa Timur (Jatim) itu meminta STNK, SIM dan nopol kendaraan berlaku seumur hidup.

## ICW Minta DPR Akomodasi Masukan Publik Saat Pembahasan RUU Perampasan Aset

**JAKARTA (IM)** - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memublikasikan setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter mengatakan, hal tersebut penting dilakukan pihak DPR untuk mengikutsertakan publik dalam pembahasan RUU yang nantinya akan berdampak terhadap publik pula.

"Pertama tentu kami mendorong agar DPR dalam setiap pembahasan dengan pemerintah itu dipublikasikan karena kan sudah ada YouTube DPR RI, Komisi III

juga kalau tidak salah punya akun YouTube sendiri, yang mana itu harusnya jadi kanal publikasi sehingga publik juga bisa mengikuti," ujar Lalola saat diminta tanggapannya soal RUU Perampasan aset, Kamis (11/5).

Menurutnya, DPR RI per-

lu membuka seluas-luasnya ruang untuk publik memberikan masukan terkait rumusan RUU Perampasan Aset. Hal itu tentunya agar hasil akhir dari pembahasan RUU tersebut merupakan rumusan yang paling baik, dan bisa diimplementasikan secara produktif untuk memberantas korupsi dan pencucian uang.

"Jadi jangan sampai RUU-nya oke misalkan di UU, tapi misalkan substansinya ternyata ngga maksimal dan kontraproduktif, nah itu yang harus dihindari," kata Lalola.

Setelah DPR RI membuka ruang untuk publik memberikan masukan terkait rumusan RUU tersebut, DPR juga harus mengakomodasi masukan dari masyarakat.

"Dan harus diakomodasi juga, maksudnya kalau sekedar formalitas bisa aja dia mengundangi, terus ada dengar pendapat, tapi kalau kemudian masukannya tidak diakomodasi kemudian, ya buat apa?" kilahnya.

Lalola menekankan bahwa keterbukaan pembahasan

Food," kata advokat Arifin Purwanto dalam berkas permohonannya yang dikutip pada Jumat (12/5).

Arifin Purwanto menyebut saat ini mengurus surat sudah bisa secara elektronik. Misalnya penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh Menkumham RI. Ada juga penerbitan surat keterangan dari pengadilan lewat aplikasi eraterang.

"Jadi pengurusan surat-surat bisa singkat dan cepat. Jadi tidak perlu harus ke kantor. Tentunya penerbitan STNK dan TNKB bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti instansi yang telah disebutkan di atas. Supaya segera jadi/selesai dalam waktu lebih

dari 1 jam," beber advokat Arifin Purwanto.

Keharusan mengurus ke kantor Samsat dialami advokat Arifin Purwanto yang memiliki sepeda motor Supra C 125. Karena sudah habis masa berlaku STNK dan nopol, maka advokat Arifin Purwanto diminta membawa sepeda motor itu ke kantor Samsat Madiun. Padahal, sepeda motornya ada di Surabaya.

"Seandainya STNKB dan TNKB tersebut berlaku selamanya, seperti sebelum Indonesia merdeka sampai 1964, maka pemohon tentu tidak perlu repot-repot membawa sepeda motor dari Surabaya ke Madiun," ucap advokat Arifin Purwanto.

Motor BMW Ariel Noah Pajaknya Mati, Mau Diurus di Jakarta.

Oleh sebab itu, advokat Arifin Purwanto meminta judicial review pasal yang dimaksud yaitu Pasal 70 ayat 2 UU LLAJ yang berbunyi:

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun. Atas permohonan itu, hakim konstitusi Suharto menyaranakan agar Pemohon memperbaiki sistematisa permohonan. Ia

menilai permohonan harus disesuaikan dengan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021).

"Jadi, kalau mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tentang perbuatan melawan hukum, gugatan cerai di Pengadilan Agama itu semua yang diperiksa oleh hakim adalah pijakannya gugatan atau permohonan di MK. Oleh karena permohonan atau gugatan itu adalah pijakan dari pada hakim untuk memeriksa dan kemudian bisa dan tidaknya perkara ini kemudian secara substansial dipertimbangkan oleh hakim sehingga hakim bisa memutuskan apakah mengabulkan atau menolak itu dasarnya adalah gugatan atau permohonan yang memang memenuhi syarat-syarat formil."

"Syarat formil itu ya bapak sudah terangkan disini kewenangan MK. Nah itu bisa memenuhi syarat formil itu. Bapak menjelaskan Pasal 24 kemudian Pasal 24C, Pasal 10 UUD MK. Sebaiknya nanti format permohonan diperbaiki, estetika permohonan juga perlu diperhatikan," ujar Suharto.

Ketua Panel Hakim Wahiduddin Adams mengatakan Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Selambatnya permohonan harus diserahkan kepada Kepaniteraan MK selambatnya pada 23 Mei 2023. ● **mei**

## KPK Sebut Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun Capai Puluhan Miliar Rupiah

**JAKARTA (IM)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti permulaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT). Dari hasil penghitungan sementara, nilai pencucian uang Rafael mencapai puluhan miliar rupiah.

"Ini terus bertambah, karena memang kita sedang mendalami. Sementara ini masih di puluhan miliar nanti akan terus bertambah, karena kita harus ngecek, harus ngecek yang kita temukan," kata Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur saat dikonfirmasi, Jumat (12/5).

Saat ini KPK masih terus menelusuri aliran pencucian uang Rafael Alun. Diduga, pencucian uang Rafael Alun mengalir ke banyak pihak. Oleh karena, Asep memprediksi nilai pencucian uang Rafael Alun masih akan terus bertambah.

"Bertambah. Lebih dari 90 dolar AS, itu kan yang awal," ujar Asep.

Bahkan, kata Asep, pihaknya membuka peluang untuk menelusuri penerimaan-penerimaan uang ataupun barang lainnya untuk Rafael Alun. Jika ditemukan adanya bukti suap, maka KPK tak segan untuk menjerat pihak

lainnya di kasus Rafael Alun.

"Jadi kan, ini kan perkara tersebut selain gratifikasinya, ada perkara-perkara yang lain, kita harus buktikan juga, selain dari gratifikasi apakah ada perkara-perkara yang lainnya, misalkan suap, apakah ada suapnya disitu, kita akan buktikan juga," ujarnya.

KPK kembali menetapkan mantan Pejabat DJP pada Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Kali ini, Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka TPPU.

KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka pencucian uang. KPK menemukan ada beberapa aset Rafael Alun yang berasal dari TPPU. Rafael Alun diduga dengan sengaja mengalihkan hasil penerimaan gratifikasinya ke sejumlah aset.

Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kemkeu. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemkeu. ● **han**



## KETERANGAN PERS TKRPP-PDI PERJUANGAN

Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (TKRPP - PDI Perjuangan) Ahmad Basarah (kedua kanan) bergandengan tangan dengan Wakil Ketua TKRPP Adian Napitupulu (kanan), Sekertaris TKRPP Deddy Yevri Sitorus (kedua kiri) dan Wakil Sekertaris TKRPP Riezky Aprilia (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 di Jakarta, Jumat (12/5). Dalam keterangan pers tersebut, Ketua TKRPP - PDI Perjuangan mengatakan telah menyiapkan kantor Sekretariat Pusat untuk relawan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Jalan Diponegoro nomor 72, Jakarta Pusat yang rencananya akan diresmikan pada 1 Juni 2023 serta telah memverifikasi dan akan memanggil 457 organisasi relawan pendukung dari seluruh Indonesia.

### PENGUMUMAN

Dengan ini, Direksi mengumumkan rencana Penggabungan PT Inavi Pariwara Citra berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai perseroan yang menggabungkan diri dan PT Shopcomm Solusi Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai perseroan yang menerima penggabungan.

Selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, dan seluruh kegiatan usaha, aktiva, pasiva, serta karyawan PT Inavi Pariwara Citra karena hukum beralih menjadi kegiatan usaha, aktiva, pasiva, serta karyawan PT Shopcomm Solusi Indonesia sebagai perseroan hasil penggabungan.

Keberatan atas rencana tersebut dapat diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Jakarta, 13 Mei 2023

PT Inavi Pariwara Citra  
Direksi

PT Shopcomm Solusi Indonesia  
Direksi